

PENGARUH SISTEM DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT TAHUN 2021

(Studi Kasus di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)

Moh. Sadiyin¹⁾, Ahmad Burhan Hakim²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

Email : muhammadsadiyin38@gmail.com¹, burhanhakim@insud.ac.id²

Abstrak : Bantuan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Pemerintah sebagai pelaksana tugas Negara memang punya tujuan untuk melakukan dan mensejahterakan masyarakat sehingga pemerintah terlihat jelas fungsi dan peranannya. Dalam upaya meringankan beban ekonomi masyarakat tersebut pemerintah Indonesia meluncurkan program bantuan pangan non tunai atau disingkat dengan BPNT. Bantuan tersebut memang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, namun dilapangan terjadi kondisi yang berbeda. Proses penyaluran bantuan tersebut terkendala proses pendataan yang kurang akurat oleh pihak penyalur bantuan atau program tersebut. Sehingga masyarakat yang harusnya menerima bantuan malah tidak mendapat bantuanm begitu juga sebaliknya. Dari kekurangan tersebut pihak penyalur akhir yakni pemerintah Desa kemudian melakukan perbaikan atau update data yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut di simpulkan bahwa penerima bantuan atau disebut dengan keluarga penerima manfaat (KPM) sangat terbantu dengan adanya program bantuan tersebut. Harapan dari masyarakat penerima bantuan agar program tersebut dapat dilanjutkan sehingga mampu meringankan beban ekonomi mereka.

Kata Kunci : *Pemerintah, Masyarakat, Bantuan,*

Abstract : Assistance is one of the ways used by the government to slightly ease the economic burden of the community, especially the poor. The government as the executor of state duties does have a goal to carry out and improve the welfare of the community so that the government's functions and roles are clearly visible. In an effort to ease the economic burden on the community, the Indonesian government launched a non-cash food assistance program or abbreviated as BPNT. The aid was intended to ease the economic burden on the community, but in the field, conditions were different. The process of distributing the aid was hampered by an inaccurate data collection process by the aid distributor or the program. So that people who should be asking for help do not receive assistance, and vice versa. From these shortcomings, the final distributor, namely the village government, then makes improvements or updates the data according to the specified criteria. The research method in this paper uses a qualitative method with a case study approach in the Sukodadi District, Lamongan Regency, East Java. Furthermore, from the results of the study, it was concluded that the beneficiaries or referred to as beneficiary families (KPM) were greatly helped by the assistance program. It is the hope of the recipient community that the program can be continued so as to ease their economic burden.

Keywords : *Government, Community, Aid*

A. Pendahuluan

Tujuan utama dalam pembangunan adalah kesejahteraan, hal ini sebagaimana tertuang UUD 1945. Ada hubungan negatif antara kesejahteraan dan tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan. Dalam pandangan negara sedang berkembang bahwa kesejahteraan itu identik dengan meningkatnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu persoalan peningkatan kesejahteraan adalah permasalahan yang bersifat multidimensional.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah bentuk instrumen untuk melindungi masyarakat dari kesengsaraan. Instrumen agar masyarakat tetap berada di atas garis kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sosial yang berbentuk barang, layanan atau modal, inilah yang disebut dengan bantuan sosial.

Bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikologi dan ekonomi), serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.¹

Sebagaimana amanat dari UUD 1945 pemerintah Indonesia meregulasi tentang bantuan sosial ini melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Dan ditafsirkan melalui Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini disalurkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui sistem akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan pada supermarket tertentu.

Pemerintah kabupaten lamongan sebagai salah satu pelaksana pemerintah di tingkat bawah, pada tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Lamongan mencapai 157,11 ribu orang, program pemerintah kabupaten untuk mensejahterakan masyarakatnya adalah diadopsinya Program BPNT. Kecamatan Sukodadi adalah Wilayah administrasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, di wilayah ini juga terdapat penduduk pra-sejahtera yang membutuhkan bantuan.

Tujuan dilaksanakan Program BPNT oleh pemerintah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi nutrisi yang seimbang pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu dengan pemberian subsidi setiap Keluarga Pra-sejahtera sebesar Rp 200.000, yang diterima setiap bulan melalui Kartu Kelurga Sejahtera (KKS) elektronik. Melalui program ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat Sukodadi yang masuk dalam kategori keluarga Pra-sejahtera, akan tetapi di Kecamatan ini, tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima program bantuan dari pemerintah yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH). sedangkan Penerima PKH secara otomatis akan menerima BPNT

B. Metode

Metode penelitian merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian, terkait dengan cara maupun alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan oleh peneliti selama proses penelitian.

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹ Kemensos 92017) retrieved 12 2018 From <https://www.kemosos.go.id/content/bantuan-social> diakses pada 10 februari 2021

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan cara mengeksplorasi dan memahami obyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, menafsirkan makna data dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka²

b. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh (Suryabrata 1987) dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: *Data Primer* dan *Skunder*. Data Primer adalah data yang digali dari obyek yang diteliti, baik melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data skunder yaitu data yang Data yang diperoleh berupa laporan yang sudah tertulis, data ini digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Metode observasi adalah penggalan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan mendetail terhadap objek pengamatan dan lingkungannya dalam kancah riset.³

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).

3. Dokumentasi

Data yang yang didapatkan dalam bentuk sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, seperti surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskreta “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “*Socius*” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.⁴

Sedangkan kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Sedangkan

² John W. Creswell (1991, 37). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications

³ Herdiansyah, Haris (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

⁴ Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi.

Dari ketiga kata yang mencakup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni:

- a. terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman),
- b. terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa),
- c. serba kecukupan (yang berarti makmur).⁵

Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁶

Menurut Todaro Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan.
- b. Tingkat Kehidupan Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa Adanya pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Dalam usaha mencapai melaksanakan jaminan sosial Negara melakukan dalam dua bentuk *pertama* Penyediaan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut, *Kedua* menyediakan bantuan langsung tunai, ketika seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya⁷

Kesejahteraan sosial juga identik dengan kualitas hidup (*quality of life*). Kualitas hidup selalu digunakan untuk mendiskripsikan “kehidupan yang lebih baik”. Pengertian kualitas hidup di atas diaplikasikan dalam UU NO.13 Tahun 1998. Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kehidupan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila”.

Manakalah kondisi kehidupan yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam UU di atas tidak dapat terlaksana karena berbagai sebab, maka kesejahteraan sosial di sini dapat

⁵ Isma‘il, M.,DKK. (2015). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.

⁶ Cit hal. 10

⁷ Ash Sadr Istishanduna Cp.cit hlm 697

dikategorikan sebagai kesejahteraan sosial negatif atau kondisi kesejahteraan sosial yang perlu diperbaiki. Ketidakadilan sosial, ekonomi dan distribusi sumber ekonomi yang tidak merata, merupakan gambaran kesejahteraan suatu masyarakat yang harus diperbaiki.⁸

Untuk menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang tinggi maka diperlukan penciptaan lingkungan yang mendukung, responsif dan memberdayakan individu dan masyarakat. Para pekerja sosial harusnya memberi perhatian sungguh-sungguh tentang bagaimana para pembuat kebijakan dari pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam merespon dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna memenuhi kebutuhan dasar rakyat, penanganan masalah sosial dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Aktivitas seperti ini merupakan aksi politik yang ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan, program, dan mekanisme penyampaian pelayanan kepada masyarakat.

3. Keseimbangan Sosial

Agar masyarakat tercipta kehidupan yang kondusif (aman) salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga keseimbangan sosial, karena sistem sosial yang tidak seimbang akan menimbulkan kecemburuan di antara mereka sehingga masyarakat mudah terjadinya gesekan, maka langkah pemerintah harus menjaga keseimbangan sosial.

Salah satu bentuk terciptanya kesejahteraan sosial Keseimbangan sosial (*At-Taudun al-Ijtima'd*) adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam namun tidak mencolok⁹. Selain memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, agama Islam memberikan tiga kewenangan kepada negara yaitu:

- a. Menerapkan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial
- b. Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara dan menjadikan sarana untuk menambah pendapatan negara
- c. Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat¹⁰

4. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.¹¹ Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan yang akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastha juga dialihkan

⁸ Cit hal. 45

⁹ Dr. Ij sunzana .Politik ekonomi islam. Dalam Ass sadr 703. Cv pustaka setia bandung. 2010

¹⁰ Ibid hal. 53.

¹¹ BPNT (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai hal 5.

menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹²

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya diatur dengan baik.

b. Tujuan, Manfaat, dan Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:

- a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
- c) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM . Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dan memenuhi kebutuhan pangan
- d) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- e) Mendorong usaha eceran rakyat

2. Manfaat program BPNT adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan social
- c) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan
- e) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).¹³

3) Besaran Manfaat program BPNT adalah sebagai berikut: Besaran BPNT adalah Rp.200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, kacang-kacangan, dan buah sesuai kebutuhan di E-warong. 19 Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan.

5. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

1) Transfer Dana Bantuan Pangan

¹² Ibid hal. 3

¹³ Ibid hal. 11

- a) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM-1 perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
 - b) Pemindah bukuan dana bantuan pangan dari rekening kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM dilakukan 30 (tiga puluh) hari dari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur
 - c) Transfer dana bantuan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM tidak dikenakan biaya administrasi
 - d) Aktiva dilakukan melalui sistem Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik bantuan Pangan KPM. 25
- 2) Notifikasi kepada KPM
- a) Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nomor HP KPM atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan ke KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai
 - b) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di atas sekurang kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dan Bantuan Pangan ke rekening KPM sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Tersebut
 - c) Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan d) Pembelian Bahan pangan oleh KPM pada E-warong.¹⁴

6. Kriteria sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a) KPM yang menerima BPNT harus terdaftar dalam data BDT
- b) Data BDT merupakan basis data yang mendata nama dan alamat (BNBA) 40 persen penduduk termiskin dikabupaten/kota tersebut
- c) KPM penerima BPNT terdiri dari KPM PKH dan KPM non PKH

7. Gambaran Umum

Kecamatan Sukodadi adalah bagian dari Kabupaten Lamongan secara Geografis Kecamatan Sukodadi terletak pada jalur Jalan Arteri DPU Bina Marga dan Jalan Kereta Api antara Jakarta-Surabaya, batas wilayah ini adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanggeneng, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Turi dan Kecamatan Lamongan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sugio dan Kecamatan Kembangbahu, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pucuk.

Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 desa yaitu desa Siwalanrejo, Kebonsari, Sukolilo, Pajangan, Kadungrebug, Sumberagung, Sukodadi, Sumberaji, Menongo, Madulegi, Banjarejo, Tlogorejo, Surabayan, Sugihrejo, Gedangan, Baturono, Plumpang, Bandungsari, Sidogembul, Balungkawun. Mayoritas warga Kecamatan Sukodadi bekerja dibidang pertanian, adapula yang bekerja dibidang jasa maupun dibidang perdagangan.

¹⁴ Ibid hal 48.

8. Data Fokus Penelitian

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. *“...BPNT sesuai dengan 6T (Tepat sasaran, harga, jumlah, mutu, waktu, dan administrasi) targetnya mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang kekurangan dalam bentuk konsumsi sehari-hari” (Wawancara Ninik, Pendamping Kecamatan Pengolah data BPNT Kecamatan Sukodadi, 28 Juli 2021)*

Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa BNPT telah disalurkan sesuai indikator pencapaian yaitu Tepat sasaran, harga, jumlah, mutu, waktu, dan administrasi di harapkan dengan penyaluran yang sesuai dengan indikator 6T ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang kekurangan dalam bentuk konsumsi sehari-hari,

Untuk mekanisme menentukan calon penerima BNPT pemerintah membuat model yang baru, sesuai penuturan Ninik pendamping Kecamatan Pengelolaan Data BPNT di bawah ini :

“...kriteria menentukan penerima BPNT dulu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu) sekarang berubah ada permensos no 5 tahun 2019 bukan BDT tetapi DTKE SOS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) semua bantuan pemerintah masuk kesitu, misalkan data tidak masuk, data tidak akan diterima. Ada beberapa kategori penerima BPNT sangat miskin, miskin dan lainnya”

Hal serupa juga disampaikan plt sekretaris desa, Ramijan bahwa: *“...penerima bantuan termasuk dalam kategori sangat miskin dan kategori miskin dengan cara di lihat dari rumahnya, penghasilannya, jumlah keluarga dll” (Wawancara, Ramijan, plt Sekretaris desa, 28 Juli 2021).*

Informasi lain disampaikan oleh penerima BPNT Darni bahwa : *“...Aku wong ora duwe nak, nyambut gawe ku buruh Tani oleh duwek RP 40.000 sedinoe, tapi gak mesti ono. Aku iki yo gak duwe sawah nak, ono program bantuan iki Alhamdulillah iso gawe nyambung uripku” (Wawancara, Darni, penerima BPNT, 29 Juli 2021).* 36

Menurut penuturan di atas BNPT ini dapat meringankan beban hidup masyarakat khususnya masyarakat kecil yang berpendapatan rendah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Napsiah pedagang sayur, bahwa: *“...karena saya orang kurang mampu, anak saya banyak, sekolah semua, saya cuma pedagang sayur penghasilan perhari tidak seberapa, masih kurang untuk menghidupi keluarga”*

Menurut kedua nara sumber di atas BNPT ini sangat membantu kehidupan masyarakat kecil, karena program ini sangat membantu bagi masyarakat, maka banyak masyarakat yang menginginkan tercatat sebagai penerima bantuan program ini seperti yang dituturkan Ramijan selaku plt sekretaris desa :

“Sangat disayangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan ada beberapa yang komplain terkait bantuan non tunai. Harusnya mereka menyadari bahwa mereka masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima berarti mereka itu masyarakat yang mampu”

Diterapkannya program ini banyak masyarakat yang ingin mendapatkan hal inilah sehingga menimbulkan ketidakpuasan sebagaimana masyarakat seperti yang diungkapkan Fatimah:

“Tidak tabu, tidak ada yang mendata penerima bantuan dirumah saya, rumah saya memang bukan termasuk kriteria karena lantainya berkeramik tapi kan itu dulu. Saya bangun rumah saat bekerja sebagai TKW. Sedangkan sekarang saya sudah tidak bekerja hanya menerima pendapatan dari suami”

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program tersebut di atas adalah dengan beberapa kriteria di antaranya adalah bentuk model kepemilikan rumah, dengan kriteria ini kurang efektif sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat, maka langkah terbaik yaitu harus mendata ulang Keluarga Penerima Manfaat (KPM seperti yang diungkapkan oleh Ramijan Perangkat Desa setempat:

“Untuk keberhasilan penyaluran BPNT itu akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data agar tepat sasaran. Ketika ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan insyaallah akan kita usulkan, hasil evaluasi akan memberikan masukan bagaimana mengetahui tantangan distribusinya”

Setelah mekanisme sistem penyaluran diperbaiki maka penyaluran ini bisa lebih baik kekurangan-demi kekurangan diperbaiki sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan, seperti yang diungkapkan oleh Ninik Pendamping Kecamatan bahwa : *“...BPNT dapat dikatakan berhasil, karena pernah mendapatkan penghargaan dari kementerian 10 besar yang realisasinya bagus sevilayah II dalam bentuk penyalurannya”*

Penataan pola administrasi yang baik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program termasuk dalam sistem distribusi Penyaluran program BPNT seperti yang diutarakan oleh seger agen e-warong yaitu Seger. :

“Untuk beras 10 kg/bulan, telur 1 kg/bulan, kacang-kacangan 0,5 kg/bulan, dan buah 1 kg/bulan tapi semisal bulan ini tidak diambil berarti bulan depan mendapat beras 20 kg/bulan, telur 2 kg/bulan, kacang-kacangan 1kg/bulan, dan buah 2 kg/bulan”

Dengan dilaksanakan program BPNT masyarakat merasakan dampak positif dari program ini seperti yang disampaikan oleh Karni selaku Penerima BPNT *“Sangat senang, saya sangat berterimakasih karena untuk masalah pangan khususnya beras saya tidak mengeluarkan biaya lagi, yang pada akhirnya saya bisa menyisihkan uang untuk keperluan lainnya. Bantuan yang saya terima beras, telur, kacang-kacangan, dan buah. Tetapi bantuan ini juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan saya sehari-hari, namun beras yang diberikan enak dan bantuan kali ini ada berupa lauknya, setidaknya keluarga saya pun mendapat asupan nutrisi yang seimbang”*

Dampak yang positif dari program BPNT benar—benar dapat dirasakan oleh masyarakat, perekonomian masyarakat semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan keterangan salah satu warga setempat Supi sebagai berikut : *“Senang bisa meringankan pengeluaran, bantuan beras dan telur lumayan bisa membantu. Bantuan beras bisa dimakan 13-14 hari dan sekarang saya ada peningkatan sehari makan 3 kali”*.

D. Kesimpulan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengalami persoalan yang disebabkan karena sistem pendataan yang kurang akurat akan tetapi setelah sistem pendataan itu diperbaiki, program ini membawa dampak yang positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat. maka program tersebut dirasa sangat bisa membantu masyarakat kurang mampu dalam

memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga diharapkan program tersebut masih bias berlanjut dan menjadi program nasional yang kemudian dapat dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat. penyaluran BPNT memang lebih banyak terkendala pada persoalan teknis semisal pendataan dan akurasi data seperti yang telah dibahas diatas. Ini menjadi koreksi sehingga kedepan pihak yang berwenang dalam penyaluran program tersebut bisa lebih maksimal dalam proses pendataan. Dimana dari proses pendataan tersebut akan punya pengaruh besar terhadap kelancaran proses penyaluran bantuan.

E. Daftar Kepustakaan

- Dr. Ij Suntana .*Politik Ekonomi Islam. Dalam Ass sadr* 703. (Cv pystacka Setia Bandung, 2010)
- Fahrudin, A.. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Isma'il, M.,DKK.. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*. (Jakarta: Erlangga, 2015)
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. (London: SAGE Publications, 1991)
- BPNT. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. (Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai 2017).

Internet

Kemensos 92017) retrieved 12 2018 From [https://www.kemensos.go.id/](https://www.kemensos.go.id/content/bantuan-social) conten/ bantuan social diakses 10 februari 2021